



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 01A TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 98 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03.A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 98 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 dan perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 98 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 98 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03.A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 98 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 03.A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 98 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03.A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 98 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 03.A), diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Januari 2018

BUPATI TABALONG,

td

M.H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 08 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 01-A

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 01.A TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 98
 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai - nilai keagamaan di masyarakat	Persentase jumlah konflik bernuansa SARA yang berhasil diselesaikan	(Penyelesaian kasus) / (Jumlah kasus) x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Angka Kriminalitas	(Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun) / (jumlah penduduk) x 10.000	Satpol PP
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS
		Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang diamatkan	
		Harapan lama sekolah	Pendidikan yang sedang dijalani kelas yang diduduki dan pendidikan yang diamatkan	
		Persentase Penduduk miskin	Jumlah Penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100%	
3	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100	Bappeda, Dismaker, BPS
		Persentase PMKS yang mandiri	Jumlah PMKS Mandiri dibagi Jumlah PMKS dikali 100	
4	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Dinas PP, PA, PP & KB
		Status Menuju Kabupaten Layak Anak	Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.	
5	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Status Menuju Kabupaten Layak Anak	Dinas PP, PA, PP & KB	
6	Meningkatnya Prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah Pemuda berprestasi minimal tingkat provinsi	Jumlah prestasi/ medali/penghargaan yang diperoleh Pemuda di Kab. Tabalong dalam berbagai kategori minimal tingkat Provinsi	Disporapar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5
7	Berkembangnya ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas	kontribusi pertanian terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian dibagi jumlah PDRB di kali 100%	Dinas Pertanian
8	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan pangan Kabupaten dan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
9	Meningkatnya pertumbuhan sektor usaha mikro dan koperasi	Tingkat pertumbuhan Jumlah UMKM	jumlah pertumbuhan usaha mikro tahun 2018 dibagi jumlah seluruh usaha mikro dikali 100	Dinas Koperasi
		Persentase koperasi dengan pertumbuhan usaha positif	jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100	Dinas Koperasi
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastrukturnya	Persentase jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten keseluruhan dikali 100 %	Dinas PU & PR
		persentase jembatan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan kondisi baik dibagi jumlah jembatan keseluruhan dikali 100%	Dinas PU & PR
		persentase desa yang dapat diakses dengan mudah	Jumlah desa yan g dapat diakses roda 4 dibagi jumlah seluruh desa dikali 100	Dinas PU & PR
		persentase sarana dan prasarana pengairan dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pengairan yang baik dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana pengairan dikali 100	Dinas PU & PR
11	Meningkatnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	persentase luas lahan pertanian yang dilayani saluran irigasi yang baik	luas lahan pertanian yang dilayani saluran irigasi yang baik dibagi jumlah seluruh lahan pertanian dikali 100	Dinas Pertanian
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari upaya untuk pemulihan kualitas lingkungan dan mengurangi laju kerusakan lingkungan	Dinas LH
12	Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif	Predikat SAKIP	B	Setda
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Setda
13	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP	BPKAD

BUPATI TABALONG,

WTD

H. ANANG SYAKHFIANI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda dibawah ini :

Nama : **Drs.H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si**
Jabatan : Bupati Tabalong

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjung, Januari 2018

Bupati Tabalong

Htd

✓ **Drs.H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai - nilai keagamaan di masyarakat	Persentase jumlah konflik bernuansa SARA yang berhasil diselesaikan	100%
		Angka Kriminalitas	6,36
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,32 tahun
		Rata-rata lama sekolah	8,46%
		Harapan lama sekolah	12,98
3	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk miskin	6,31 %
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,1 %
4	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PMKS mandiri	80%
5	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,07
		Status Menuju Kabupaten Layak Anak	Nindya
6	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah prestasi/medali/penghargaan yang diperoleh Pemuda di Kab. Tabalong dalam berbagai katagori minimal tingkat provinsi	14
7	Berkembangnya ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas	Prosentase kontribusi pertanian terhadap PDRB	10,21 %
8	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Cadangan Pangan	9,00 ton
9	Meningkatnya pertumbuhan sektor usaha mikro dan koperasi	Tingkat pertumbuhan usaha mikro	50%
		Persentase koperasi aktif	71,43 %
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase jalan dalam kondisi baik	81,43 %
		persentase jembatan dalam kondisi baik	82%
		persentase desa yang dapat diakses dengan mudah	98,35 %
		persentase sarana dan prasarana pengairan dalam kondisi baik	71%
		persentase luas lahan pertanian yang dilayani saluran irigasi yang baik	85%
11	Meningkatnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :	
		Kualitas Air	54
		Kualitas Udara	83
		Tutupan Lahan	61
12	Terwujudnya Manajemen Perencanaan yang efektif	Predikat SAKIP	B
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : Rp 1.495.671.700.000,-

BUPATI TABALONG

ttd

Drs. H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si